

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN MASYARAKAT DESA WINONG KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Ahmad Sa'roni *) Ayun Sriatmi **) Septo Pawelas Arso***)

*) Mahasiswa Peminatan AKK FKM UNDIP

***) Dosen AKK FKM UNDIP

****) Dosen AKK FKM UNDIP

E-mail: ahmadsaroni539@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan ruang atau area yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan maupun mempromosikan produk dari tembakau. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian survey bersifat eksplanatori (*explanatory research*) yang bersifat deskriptif analitik. Berdasarkan pendekatan waktu penelitiannya, rancangan penelitian ini merupakan rancangan *cross sectional* yang subyeknya hanya diobservasi sekali (*point time approach*). Instrumen penelitian menggunakan kuesioner terstruktur terhadap masyarakat Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati yang berjumlah 106 orang.

Data penelitian diolah secara kuantitatif dengan metode univariat dan bivariat menggunakan uji *chi square* menunjukkan persentase mengenai pengetahuan tinggi (52,8%), sikap yang baik (56,6%), motivasi yang rendah (52,8%), memiliki persepsi yang baik mengenai sarana prasarana (55,7%), memiliki persepsi yang baik mengenai pengawasan (51,9%) dan memiliki persepsi yang kurang mengenai dukungan aparat desa (53,8%). Dari hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap, pengawasan, dan sarana prasarana terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ($p < 0,05$). Sedangkan pengetahuan, motivasi dan dukungan aparat desa tidak ada hubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ($p > 0,05$).

Saran yang dapat direkomendasikan dalam pelaksanaan Perda tentang KTR perlu adanya pengawasan, evaluasi dan sanksi yang tegas serta tidak tebang pilih terhadap pelaksanaan Perda tersebut.

Kata Kunci : Kepatuhan, Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok
Keputakaan : 48 (1979-2015)

PENDAHULUAN

Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau.¹ Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 pasal 49 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Pada peraturan tersebut pemerintah daerah diwajibkan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).¹

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri telah bekerja sama membuat Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 88/Menkes/PB/II/2011 Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.² Isi dari regulasi tersebut merupakan dorongan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan dan melaksanakan KTR diwilayahnya masing-masing, memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota tentang KTR serta memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan KTR.

Berdasarkan Riskesdas tahun 2013 diketahui di Provinsi Jawa Tengah jumlah perokoknya sebesar 22,9% dari total perokok di Indonesia.

Rata-rata rokok yang dihisap setiap hari di Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,1 batang setara dengan satu bungkus rokok. Berdasarkan kelompok umur diketahui bahwa proporsi terbesar 47,5% pada kelompok umur 15-19 tahun diikuti umur 20-24 tahun 26,1%. Perokok yang mempunyai kebiasaan merokok dalam gedung 87,7% dan di luar gedung 12,3%. Secara umum proporsi jenis rokok yang dihisap terbanyak adalah rokok kretek 78,3%, diikuti rokok putih 42,2%, rokok lencing 20,4% dan cerutu 0,3%.

Sedangkan untuk proporsi perokok di Kabupaten Pati, diketahui perokok pada umur 15-19 tahun menunjukkan persentase sebesar 37,6% diikuti umur 20-24 tahun dengan persentase 36,5%. Perokok yang mempunyai kebiasaan merokok dalam gedung 82% dan di luar gedung 18%. Secara umum proporsi jenis rokok yang dihisap terbanyak adalah rokok kretek 66,7%, diikuti dengan rokok putih 36,3%, rokok lencing 3,7%.³

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati diketahui bahwa sosialisasi terkait Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah dilaksanakan pada tempat-tempat yang termasuk kawasan tanpa rokok. Sosialisasi tersebut berupa pemberian informasi kepada warga tentang kawasan tanpa rokok melalui papan peringatan, papan reklame dan lain sebagainya. Namun dari pelaksanaan sosialisasi yang ada, pada tempat-tempat umum terutama yang termasuk kawasan tanpa rokok masih terdapat warga yang merokok.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Desa Winong merupakan sebuah desa yang terletak di Kawasan Perkotaan di

Kabupaten Pati. Desa Winong ini terdapat banyak area yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok, diantaranya: Rumah Sakit Mitra Bangsa, Polres Pati, tempat-tempat pendidikan mulai SD sampai SMA/SMK, Stadion Joyo Kusumo, dan Pasar Puri. Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Desa Winong yang memiliki tempat-tempat yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Kesadaran masyarakat dari perokok aktif masih rendah terhadap perokok pasif. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang area bebas rokok nantinya diharapkan akan mampu menyelamatkan nasib perokok pasif di tengah banyaknya jumlah perokok aktif yang ada

Untuk mengetahui patuh tidaknya masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, peneliti melakukan studi pendahuluan terhadap masyarakat Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang peneliti jadikan lokasi obyek penelitian. Dari observasi yang dilakukan peneliti, masih terdapat banyak tempat yang seharusnya merupakan Kawasan Tanpa Rokok tetapi masih digunakan oleh masyarakat untuk merokok, misalnya masih ada masyarakat yang merokok di fasilitas pelayanan kesehatan di tempat menunggu pasien padahal seharusnya dilarang merokok; di tempat proses belajar mengajar masih adanya guru yang mengajar masih merokok dan seharusnya guru memahami bahwa tempat proses belajar mengajar dilarang untuk merokok; di tempat bermain anak (*play group*) masih banyak orang tua yang merokok ketika menunggu anaknya yang seharusnya di tempat bermain anak tidak boleh digunakan untuk merokok; masih ada warga yang merokok pada tempat ibadah

yang seharusnya tidak digunakan untuk merokok karena bisa mengganggu ibadah; masih banyak pekerja atau karyawan yang merokok di tempat kerja dan belum sepenuhnya mematuhi larangan merokok di tempat kerja; pada angkutan umum masih ada sopir bus yang terbiasa merokok di dalam bus padahal sudah terpasang poster larangan merokok. Dari data tersebut menunjukkan belum adanya kepatuhan masyarakat Desa Winong terhadap Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey bersifat eksplanatori (*explanatory research*) dan yang bersifat deskriptif analitik. Berdasarkan pendekatan waktu penelitiannya, rancangan penelitian ini merupakan rancangan *cross sectional* yang subyeknya hanya diobservasi sekali (*point time approach*).

Populasi dan Sampel

Populasi yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu seluruh penduduk di Desa Winong yang berumur > 13 tahun yang berjumlah 5.745 orang.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 106 orang penduduk. Teknik pengambilan sampel ini dengan menggunakan teknik *cluster and proportional random sampling*.

Instrumen Penelitian

Alat/instrumen pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan alat untuk mengumpulkan data dari responden yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun dengan baik sehingga interviewer tinggal menuliskan jawaban atau memberikan tanda

tertentu pada daftar pertanyaan tersebut.

Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Proses editing adalah kegiatan pengecekan terhadap isian kuisoner apakah jawaban lengkap, jelas, relevan, dan konsisten. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari wawancara dengan menggunakan kuisoner akan diperiksa kembali oleh peneliti sebelum nantinya diolah oleh peneliti, untuk memastikan bahwa tidak terdapat data yang meragukan dan hal-hal yang salah.

b. Pemberian kode (*coding*)

Pemberian *coding* dilakukan dengan mengklasifikasikan jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori. Klasifikasi terhadap jawaban responden dilakukan dengan jalan menandai masing-masing jawaban berupa angka-angka, setelah itu lalu dimasukkan ke dalam lembar jawaban agar memudahkan dalam membacanya.

c. Skoring

Skoring ini dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis data dengan memberikan nilai, dengan nilai tertinggi sampai nilai terendah dari kuisoner yang diajukan kepada responden.

d. Tabulasi (*Tabulating*)

Tabulasi dilakukan dengan membuat tabel semua jawaban yang sudah diberi skor dan dimasukkan ke dalam tabel yang tersedia sesuai dengan tujuan

penelitian. Pembuatan tabel ini setidaknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Saat melakukan tabulasi diperlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan.

2. Analisis

Analisis dalam penelitian ini berupa analisis data univariat, dan bivariat.

a. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mendapat gambaran tentang distribusi frekuensi responden untuk masing-masing variabel yang bertujuan menjelaskan atau mendeskripsikan hasil jawaban setiap variabel penelitian. Analisis data ini digunakan untuk mendeskripsikan semua variabel yang diteliti yaitu pengetahuan, sikap, motivasi, sarana prasarana, pengawasan dan dukungan aparat desa.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis dua variabel, untuk mencari hubungan variabel bebas dan variabel terikat dengan uji statistik yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan skala data. Uji yang digunakan dalam analisis yaitu Uji *Chi Square* dengan membuat tabel silang (*crosstab*) antara variabel pengetahuan, sikap, motivasi, sarana prasarana, pengawasan dan dukungan aparat desa dengan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2014 Tentang KTR.

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Bivariat Variabel Penelitian

1. Hubungan Antara Variabel Pengetahuan dengan Kepatuhan Masyarakat dalam pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang memiliki kepatuhan yang kurang dan juga memiliki pengetahuan yang kurang baik ternyata persentasenya 42% lebih rendah dibandingkan dengan yang memiliki pengetahuan yang tinggi yaitu sebesar 46,4%. Sedangkan pada kelompok responden yang kepatuhan yang tinggi, memiliki pengetahuan yang kurang persentasenya 58% lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pengetahuan yang tinggi yaitu sebesar 53,6%. Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh *nilai p* = 0,647, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Hubungan Antara Variabel Sikap dengan Kepatuhan Masyarakat dalam pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang kurang memiliki kepatuhan dan juga memiliki sikap yang kurang baik persentasenya 58,7% lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki sikap yang baik yaitu sebesar 33,3%. Sedangkan pada kelompok responden yang memiliki kepatuhan yang tinggi dan juga memiliki sikap yang kurang baik persentasenya 41,3% lebih rendah dibandingkan dengan yang memiliki sikap yang baik yaitu sebesar 66,7%. Dari hasil analisis dengan menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh *nilai p* = 0,009, dengan demikian maka terdapat hubungan antara sikap dengan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Hubungan Antara Variabel Motivasi dengan Kepatuhan Masyarakat dalam pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok responden yang kurang memiliki kepatuhan dan juga memiliki motivasi yang rendah persentasenya 44,6% lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki motivasi yang tinggi yaitu sebesar 44%. Sedangkan pada kelompok responden yang memiliki kepatuhan yang tinggi dan juga memiliki motivasi yang

rendah persentasenya 55,4% lebih rendah dibandingkan dengan yang memiliki motivasi yang tinggi yaitu sebesar 56%. Hasil analisis secara statistika menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh nilai $p = 0,947$, sehingga dapat tarik kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara motivasi dengan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang KTR.

4. Hubungan Antara Variabel Sarana Prasarana dengan Kepatuhan Masyarakat dalam pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang kurang memiliki kepatuhan dengan sarana prasarana untuk pelaksanaan Perda Kab. Pati tentang Kawasan Tanpa Rokok yang kurang baik persentasenya 68,1% lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki sarana prasarana yang baik yaitu sebesar 25,4%. Sedangkan pada kelompok responden yang memiliki kepatuhan yang tinggi dengan sarana prasarana untuk pelaksanaan Perda Kab. Pati tentang Kawasan Tanpa Rokok yang kurang baik persentasenya 31,9% lebih rendah dibandingkan dengan yang memiliki sarana prasarana yang baik yaitu sebesar 74,6%. Hasil analisis dengan uji *Chi-Square* diperoleh nilai $p = 0,000$, dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara sarana prasarana dengan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

5. Hubungan Antara Variabel Pengawasan dengan Kepatuhan Masyarakat dalam pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang kurang memiliki kepatuhan dengan persepsi responden mengenai pengawasan pelaksanaan Perda Kab. Pati tentang Kawasan Tanpa Rokok yang kurang baik persentasenya 58,8% lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi responden mengenai pengawasan yang baik yaitu sebesar 30,9%. Sedangkan pada kelompok responden yang memiliki kepatuhan tinggi dengan persepsi responden terhadap pengawasan pelaksanaan Perda Kab. Pati tentang Kawasan Tanpa Rokok yang kurang baik persentasenya 41,2% lebih rendah dibandingkan dengan persepsi responden terhadap pengawasan yang baik yaitu sebesar 69,1%. Hasil analisis dengan menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh nilai $p = 0,004$, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengawasan dengan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

6. Hubungan Antara Variabel Dukungan Aparat Desa dengan Kepatuhan Masyarakat dalam pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang kurang memiliki kepatuhan dengan persepsi responden terhadap dukungan aparat desa yang kurang persentasenya 52,6% lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang mempersepsikan dukungan aparat desa tinggi yaitu sebesar 34,7%. Sedangkan pada kelompok responden dengan kepatuhan tinggi yang mempersepsikan dukungan aparat desa yang masih kurang persentasenya 47,4% lebih rendah dibandingkan dengan yang mempersepsikan dukungan aparat desa tinggi yaitu sebesar 65,3%. Pada hasil analisis menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh nilai $p = 0,064$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara dukungan aparat desa dengan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Gambaran karakteristik responden sebagian besar berumur 18-40 tahun (47,2%), tingkat pendidikan responden sebagian besar lulusan SMA (42,5%), jenis kelamin didominasi laki-laki (68,9%), pendapatan sebagian besar \geq UMR (64,2%), dan pekerjaan responden rata-rata berasal dari pedagang (34,9%).
2. Kepatuhan masyarakat Desa Winong dalam pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok cenderung lebih tinggi. Persentase kelompok responden yang memiliki kepatuhan yang tinggi lebih banyak persentasenya yaitu sebesar 55,7% dibandingkan kelompok responden yang memiliki kepatuhan yang kurang yaitu sebesar 44,3%.
3. Masyarakat Desa Winong dalam melaksanakan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagian besar memiliki pengetahuan tinggi (52,8%), memiliki sikap yang baik terhadap pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (56,6%), memiliki motivasi yang rendah terhadap pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (52,8%), memiliki persepsi yang baik mengenai sarana prasarana untuk pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (55,7%), memiliki persepsi yang baik mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (51,9%) dan memiliki persepsi yang kurang mengenai dukungan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan

- aparatus desa terhadap pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (53,8%).
4. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan p value 0,647.
 5. Ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan p value 0,009.
 6. Tidak ada hubungan antara motivasi dengan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan p value 0,947.
 7. Ada hubungan antara sarana prasarana dengan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan p value 0,000.
 8. Ada hubungan antara pengawasan dengan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan p value 0,004.
 9. Tidak ada hubungan antara dukungan aparat desa dengan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Kab. Pati No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan p value 0,064.
- memberikan hasil yang maksimal, sebaiknya penetapan kebijakan tersebut diikuti dengan memberikan contoh dari aparat pemerintah desa untuk tidak merokok di tempat-tempat tertentu, misalnya aparat pemerintah desa tidak merokok ketika ada acara pertemuan desa.
- a. Perlu adanya sanksi yang tegas dan bersifat memaksa untuk mewujudkan perubahan perilaku pada masyarakat, yaitu dengan pemberian sanksi yang tegas dan tidak tebang pilih bagi masyarakat dan perusahaan yang tidak mengindahkan kebijakan ini,
 - b. Pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola area KTR untuk bertindak lebih tegas dalam pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok terutama dalam hal pemberian ijin pemasangan reklame rokok.
 - c. Agar fungsi pengawasan lebih efektif, perlu adanya pengawasan yang terstruktur dan berjenjang sesuai dengan jabatannya. Pejabat atasan akan menegur bawahannya ketika melanggar ketentuan dari peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama.
 - d. Bagi Dinas Kesehatan Kota Pati
 - a. Perlu adanya pembentukan tim khusus yang independen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan tim tersebut ditempatkan di lokasi-lokasi yang tergolong kategori tempat umum agar terdapat perbaikan dalam hal sistem

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Winong Pati
 - a. Agar pengendalian perilaku merokok di masyarakat

- operasional pelaksanaan kebijakan.
- b. Dinas Kesehatan perlu evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan dari pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok yang meliputi tingkat keefektifan strategi kebijakan, keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman yang muncul selama pelaksanaan kebijakan.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pada pelaksanaan selanjutnya, Dinas Kesehatan harus lebih tanggap terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pihak pengelola tempat umum,
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
- a. Agar cakupan penelitiannya lebih luas yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka penelitian selanjutnya agar dilakukan daerah lain yang memiliki karakteristik yang lebih berbeda.
 - b. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang serupa dengan menambah variabel lain mengenai faktor

yang berhubungan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/II/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
3. Santoso Budi. Pokok-pokok Hasil Riset kesehatan dasar propinsi jawa tengah . Jakarta: Bdan Litbankes; 2013